

LAPORAN KINERJA INSTANSI PEMERINTAH + (LKJIP)

2024



BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH

KATA PENGANTAR

Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP) Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Rembang Tahun 2024 disusun berdasarkan Perjanjian Kinerja Tahun 2024. LKjIP Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Rembang Tahun 2024 merupakan bentuk akuntabilitas publik dari pelaksanaan tugas dan fungsi dan penggunaan anggaran yang dipercayakan kepada setiap instansi pemerintah. Penyusunan LKjIP Tahun 2024 diwarnai dengan berbagai tantangan dan permasalahan yang harus dihadapi. Namun demikian, sebagai jajaran Perangkat Daerah di lingkungan Pemerintah Kabupaten Rembang, Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Rembang tetap mengupayakan optimalisasi capaian target kinerja yang telah diperjanjikan. Proses penyusunan laporan ini membutuhkan kesiapan dan kerja keras dari seluruh jajaran instansi pemerintah terkait, agar dapat menghasilkan sebuah laporan yang akurat, transparan dan dapat dipertanggungjawabkan secara baik kepada publik.

Tujuan penyusunan laporan ini adalah untuk memberikan gambaran tingkat pencapaian instansi yang mengindikasikan tingkat keberhasilan dan kegagalan pencapaian sasaran strategis berdasarkan indikator-indikator yang ditetapkan. Diharapkan penyajian LKjIP ini dapat menjadi bahan evaluasi untuk perbaikan kinerja agar lebih berorientasi pada hasil, relevan, efektif, efisien dan berkelanjutan di masa mendatang.

Rembang, 24 Februari 2025

KEPALA PELAKSANA
BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH
KABUPATEN REMBANG



SRI JARWATI, M.Pd., M.H.
Bendahara Utama Muda
NIP. 19660826 198806 2 001

IKHTISAR EKSEKUTIF

Capaian kinerja BPBD Kabupaten Rembang tahun 2024 dalam mewujudkan sasaran strategis dapat digambarkan sebagai berikut:

1. Capaian tujuan strategis pada BPBD Kabupaten Rembang yakni “Meningkatnya kapasitas ketangguhan bencana daerah” dengan capaian indikator Indeks Ketahanan Daerah dan sasaran yang akan dicapai yakni “Meningkatnya ketahanan daerah terhadap bencana” dengan capaian indikator sasaran Presentase Penanganan Bencana Daerah dan “Meningkatnya kualitas penanganan ketertiban umum dan ketentraman masyarakat” dengan capaian indikator sasaran Presentase Pelayanan Pemadaman dan Penyelamatan Kebakaran.
 - a. Indeks Ketahanan Daerah diukur berdasarkan Perka BNPB Nomor 3 Tahun 2012.
 - b. Capaian indikator dimaksud didukung oleh kinerja 3 (tiga) Program, yakni Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah, Program Penanggulangan Bencana, dan Program Pencegahan, penanggulangan, penyelamatan kebakaran dan penyelamatan non kebakaran.
 - c. Di luar indikator sasaran strategis, pencapaian kinerja BPBD Kabupaten Rembang juga ditunjukkan oleh pencapaian target terkait dengan Standart Pelayanan Minimal kebencanaan sesuai Permendagri Nomor 101 Tahun 2018 dan SPM kebakaran sesuai Permendagri Nomor 114 Tahun 2018.
 - d. Target capaian indikator tujuan tahun 2024 sebesar 0,61 dengan realisasi 0,65. Target capaian indikator sasaran pertama tahun 2024 sebesar 84% dengan realisasi 100%. Target capaian indikator sasaran kedua tahun 2024 sebesar 85% dengan realisasi 100%. Dengan demikian capaian ini telah melampaui target. Prosentase realisasi terhadap target (realisasi dibagi target dikalikan 100%) mencapai 100% lebih.

Terhadap capaian kinerja sebagaimana tersebut di atas terdapat beberapa tantangan yang perlu menjadi perhatian bagi Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Rembang ke depan, sebagai berikut:

1. Belum memiliki dokumen RPB dan dokumen R3P
2. Belum optimalnya dukungan lintas sektor dalam pembiayaan dan penyelenggaraan penanggulangan bencana
3. Masih banyak desa yang mengalami kekurangan air bersih pada saat musim kemarau karena minimnya sumber air yang ada
4. Masih tingginya kejadian abrasi di sepanjang pantai Kabupaten Rembang
5. Belum semua desa rawan bencana terbentuk DESTANA
6. Masih belum didirikannya pos damkar, minimal di setiap eks kawedanan di wilayah Kabupaten Rembang, sehingga dalam penanganan kebakaran tercapai waktu tanggap 15 menit (respon time).

DAFTAR ISI

KATA PENGANTAR	i
DAFTAR ISI	ii
DAFTAR TABEL	iv
DAFTAR GAMBAR	v
BAB I PENDAHULUAN	1
1.1 Latar Belakang	1
1.2 Penjelasan Umum Organisasi	2
1.2.1 Struktur Organisasi dan Tata Kerja	2
1.2.2 Anggaran	3
1.3 Dasar Hukum	3
1.4 Sistematika Laporan Kinerja	4
BAB II PERENCANAAN KINERJA	6
2.1 Tujuan dan Sasaran Perangkat Daerah	6
2.2 Rencana Kinerja Tahun n	7
2.3 Perjanjian Kinerja Tahun 2024	7
BAB III AKUNTABILITAS KINERJA	11
3.1 Capaian Kinerja	11
3.1.1 Skala Capaian Kinerja	12
3.1.2 Membandingkan antara target dan realisasi tahun pelaporan	12
3.1.3 Membandingkan antara realisasi kinerja serta capaian kinerja tahun ini dengan tahun lalu dan 2 tahun terakhir	13
3.1.4 Membandingkan realisasi kinerja sampai dengan tahun ini dengan target jangka menengah yang terdapat dalam dokumen perencanaan strategis organisasi	13
3.1.5 Membandingkan realisasi kinerja tahun ini dengan standar nasional (jika ada)	14
3.1.6 Analisis penyebab keberhasilan/kegagalan atau peningkatan/penurunan kinerja serta alternatif solusi yang telah dilakukan	15
3.1.7 Analisis atas efisiensi penggunaan sumber daya	16
3.1.8 Analisis program/kegiatan/Sub Kegiatan yang menunjang keberhasilan ataupun kegagalan pencapaian pernyataan kinerja	17
3.2 Realisasi Anggaran	18
BAB IV PENUTUP	19
LAMPIRAN	20

DAFTAR TABEL

Tabel 1.1	Perbandingan Anggaran Tahun 2023 dan Tahun 2024.....	3
Tabel 2.1	Tujuan, Sasaran, Indikator, dan Target Kinerja Perangkat Daerah Tahun Periode Rencana Strategis.....	6
Tabel 2.2	Indikator Kinerja Utama Perangkat Daerah Tahun 2024.....	6
Tabel 2.3	Rencana Kinerja Tahun 2024.....	6
Tabel 2.4	Perjanjian Kinerja Tahun 2024 Perangkat Daerah.....	7
Tabel 2.5	Program, Kegiatan, dan Sub Kegiatan Perangkat Daerah Tahun 2024.....	8
Tabel 2.6	Perubahan Perjanjian Kinerja Tahun 2024 Perangkat Daerah (bila ada).....	9
Tabel 2.7	Perubahan Program, Kegiatan, dan Sub Kegiatan Perangkat Daerah Tahun 2024.....	9
Tabel 3.1	Pengkategorian Capaian Kinerja.....	12
Tabel 3.2	Capaian Indikator Kinerja Utama Tahun 2024.....	12
Tabel 3.3	Perbandingan Capaian Kinerja.....	13
Tabel 3.4	Kemajuan Capaian Sasaran Strategis	13
Tabel 3.5	Perbandingan Capaian dengan Standar Nasional/Provinsi/ Kabupaten/Kota.....	14
Tabel 3.6	Analisis Keberhasilan, Kegagalan, dan Solusi.....	15
Tabel 3.7	Perbandingan Pencapaian Kinerja dan Anggaran Tujuan dan Sasaran.....	15
Tabel 3.8	Analisis Keberhasilan dan Kegagalan Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan.....	16
Tabel 3.9	Capaian Anggaran Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan....	17

DAFTAR GAMBAR

Gambar 1.1 Cascading Organisasi.....	3
Gambar 1.2 Struktur Organisasi.....	3

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Dalam rangka meningkatkan pelaksanaan pemerintah yang berdaya guna, berhasil guna, bersih dan bertanggung jawab, telah diterbitkan Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP). Pelaksanaan lebih lanjut didasarkan atas Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (PANRB) Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Reviu Atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah.

Pada Peraturan Menteri PANRB Nomor 53 Tahun 2014 menjelaskan bahwa laporan kinerja merupakan bentuk akuntabilitas dari pelaksanaan tugas dan fungsi yang dipercayakan kepada setiap instansi pemerintah atas penggunaan anggaran. Hal terpenting yang diperlukan dalam penyusunan laporan kinerja adalah pengukuran kinerja dan evaluasi serta pengungkapan (*disclosure*) secara memadai hasil analisis terhadap pengukuran kinerja. Kemudian berdasarkan ketentuan Pasal 18 Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014, setiap perangkat daerah yang merupakan entitas akuntabilitas kinerja, menyusun dan menyajikan laporan kinerja atas prestasi kerja yang dicapai berdasarkan penggunaan anggaran yang telah dialokasikan. Sehubungan dengan hal tersebut maka Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Rembang diwajibkan untuk menyusun Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP).

Penyusunan LKjIP Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Rembang Tahun 2024 yang dimaksudkan untuk memberikan gambaran terkait pencapaian kinerja tujuan dan sasaran perangkat daerah yang telah ditetapkan dan diperjanjikan pada perjanjian kinerja perangkat daerah. Penyusunan pelaporan kinerja bertujuan untuk memberikan informasi kinerja yang terukur kepada pemberi mandat atas kinerja yang telah dan seharusnya

dicapai, dan juga sebagai upaya perbaikan berkesinambungan bagi instansi pemerintah untuk meningkatkan kinerja.

1.2 Dasar Hukum

Laporan Kinerja Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Rembang ini disusun berdasarkan beberapa dasar hukum sebagai berikut :

1. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang.
2. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara.
3. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan Dan Kinerja Instansi Pemerintah.
4. Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah.
5. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara Dan Reformasi Birokrasi Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja Dan Tata Cara Reviu Atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah.
6. Surat Edaran Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara Dan Reformasi Birokrasi Nomor 5 Tahun 2021 tentang Pelaporan Kinerja Pemerintah Daerah.
7. Peraturan Bupati Kabupaten Rembang Nomor 30 Tahun 2024 tentang Pedoman Pelaporan Pelaksanaan Kegiatan Pemerintah Daerah
8. Surat Edaran Sekda Kabupaten Rembang No 000.8/0063/2025 tentang Penyusunan Perjanjian Kinerja 2025 dan Laporan Kinerja 2024.

1.3 Penjelasan Umum Organisasi

Sesuai dengan UU Nomor 24 Tahun 2007 dan Perda Kabupaten Rembang Nomor 5 Tahun 2015, BPBD Kabupaten Rembang mempunyai 3 (tiga) fungsi utama penanggulangan bencana yaitu pelaksana, koordinasi dan komando.

1.3.1 Struktur Organisasi dan Tata Kerja

Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Rembang terbentuk berdasarkan Peraturan Bupati Rembang Nomor 77 Tahun 2021 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi Serta Tata Kerja Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Rembang yang mempunyai tugas dan fungsi di Bidang Penanggulangan Bencana.

A. Tugas dan Fungsi

Peraturan Bupati Rembang Nomor 77 Tahun 2021 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi Serta Tata Kerja Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Rembang menyebutkan bahwa BPBD mempunyai tugas:

1. menetapkan pedoman dan pengarahan terhadap usaha penanggulangan bencana yang mencakup pencegahan bencana, penanganan darurat, rehabilitasi, rekonstruksi serta penanggulangan kebakaran secara adil dan setara;
2. menetapkan standarisasi serta kebutuhan penyelenggaraan penanggulangan bencana berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan;
3. menyusun, menetapkan, dan menginformasikan peta rawan bencana;
4. menyusun dan menetapkan prosedur tetap penanganan bencana;
5. melaporkan penyelenggaraan penanggulangan bencana kepada Bupati setiap bulan sekali dalam kondisi normal dan setiap saat dalam kondisi darurat bencana;
6. mengendalikan pengumpulan dan penyaluran uang dan barang;
7. mempertanggungjawabkan penggunaan anggaran yang diterima dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah; dan
8. melaksanakan kewajiban lain sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Dalam menyelenggarakan tugas dan kewajiban tersebut Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Rembang mempunyai fungsi :

1. perumusan dan penetapan kebijakan penanggulangan bencana, penanggulangan kebakaran dan penanganan pengungsi dengan

- bertindak cepat dan tepat, efektif dan efisien; dan
2. pengoordinasian pelaksanaan kegiatan penanggulangan bencana dan penanggulangan kebakaran secara terencana, terpadu dan menyeluruh.

Dalam pelaksanaan tugas pokok dan fungsinya, BPBD didelegasikan menjadi tiga bidang dan sekretariat yang mempunyai tugas pokok dan fungsi sebagaimana diatur dalam Peraturan Bupati Rembang Nomor 77 Tahun 2021 sebagai berikut:

1) Kepala Pelaksana

Kepala Pelaksana BPBD mempunyai tugas melaksanakan urusan pemerintahan bidang ketenteraman, ketertiban umum dan perlindungan masyarakat meliputi sub urusan penanggulangan bencana dan sub urusan penanggulangan kebakaran yang menjadi kewenangan daerah dan tugas pembantuan yang ditugaskan kepada daerah.

Untuk menyelenggarakan tugas tersebut, Kepala Pelaksana BPBD mempunyai fungsi:

- a. merumuskan kebijakan teknis di bidang penanggulangan bencana dan penanggulangan kebakaran;
- b. pelaksanaan koordinasi di bidang penanggulangan bencana dan penanggulangan kebakaran;
- c. pelaksanaan kebijakan di bidang penanggulangan bencana dan penanggulangan kebakaran;
- d. pemantauan, evaluasi dan pelaporan pelaksanaan tugas di bidang penanggulangan bencana dan penanggulangan kebakaran;
- e. pelaksanaan fungsi kesekretariatan badan; dan pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Pimpinan.

2) Sekretariat

Sekretariat mempunyai tugas melaksanakan perumusan konsep dan pelaksanaan kebijakan, pengoordinasian, pemantauan, evaluasi serta pelaporan meliputi program, keuangan, kehumasan, keorganisasian dan ketatalaksanaan, pembinaan ketatausahaan, kearsipan, kerumahtanggaan, kepegawaian, produk hukum dan pelayanan administrasi di

lingkungan Badan. Adapun fungsi Sekretariat adalah sebagai berikut:

- a. pengoordinasian dan penyusunan rencana dan program kerja di lingkungan Badan;
- b. pengoordinasian, pembinaan dan pemberian dukungan administrasi yang meliputi program, keuangan, hubungan masyarakat, ketatausahaan, kearsipan, kerumahtanggaan, kepegawaian dan pelayanan administrasi di lingkungan Badan;
- c. pengoordinasian, pembinaan dan penataan organisasi dan tata laksana di lingkungan Badan;
- d. pengoordinasian penyusunan produk hukum di lingkungan Badan;
- e. pengoordinasian pelaksanaan sistem pengendalian intern pemerintah dan pengelolaan informasi dan dokumentasi;
- f. penyelenggaraan pengelolaan barang milik/kekayaan daerah dan pelayanan pengadaan barang/jasa di lingkungan Badan;
- g. pelaksanaan monitoring, evaluasi dan pelaporan sesuai dengan lingkup tugasnya; dan
- h. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh pimpinan.

3) Bidang Pencegahan dan Kesiapsiagaan

Bidang Pencegahan dan Kesiapsiagaan mempunyai tugas melaksanakan penyiapan perumusan konsep dan pelaksanaan kebijakan, pengoordinasian, pemantauan, evaluasi serta pelaporan di bidang pencegahan dan kesiapsiagaan.

Adapun fungsi Bidang Pencegahan dan Kesiapsiagaan sebagai berikut:

- a. penyiapan bahan perumusan kebijakan teknis, pembinaan dan pelaksanaan kegiatan bidang pencegahan dan kesiapsiagaan;
- b. pengelolaan dan penyelenggaraan kegiatan bidang pencegahan dan kesiapsiagaan untuk mendukung kelancaran pelaksanaan tugas dan fungsi Badan;
- c. pengoordinasian dan pengendalian pelaksanaan kegiatan bidang pencegahan dan kesiapsiagaan; dan

d. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh pimpinan.

4) Bidang Kedaruratan, Logistik dan Rehabilitasi Rekonstruksi

Bidang Kedaruratan, Logistik dan Rehabilitasi Rekonstruksi mempunyai tugas melaksanakan penyiapan perumusan konsep dan pelaksanaan kebijakan, pengoordinasian, pemantauan, evaluasi serta pelaporan di bidang kedaruratan dan logistik yang terdiri dari kedaruratan serta logistik, dan rehabilitasi rekonstruksi.

Adapun fungsi Bidang Kedaruratan, Logistik dan Rehabilitasi Rekonstruksi adalah sebagai berikut:

- a. penyiapan bahan perumusan kebijakan teknis, pembinaan dan pelaksanaan kegiatan bidang kedaruratan serta logistik, rehabilitasi dan rekonstruksi;
- b. pengelolaan dan penyelenggaraan kegiatan bidang kedaruratan serta logistik, rehabilitasi dan rekonstruksi untuk mendukung kelancaran pelaksanaan tugas dan fungsi Badan;
- c. pengoordinasian dan pengendalian pelaksanaan kegiatan bidang kedaruratan serta logistik, rehabilitasi dan rekonstruksi;
- d. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh pimpinan.

5) Bidang Pemadam Kebakaran

Bidang Pemadam Kebakaran mempunyai tugas melaksanakan perumusan konsep dan pelaksanaan kebijakan, pengoordinasian, pemantauan, evaluasi serta pelaporan Bidang Pemadam Kebakaran yang terdiri dari pencegahan dan pemberdayaan masyarakat serta pemadaman, penyelamatan dan sarana prasarana.

Adapun fungsi Bidang Pemadam Kebakaran adalah:

- a. penyiapan bahan perumusan kebijakan teknis, pembinaan dan pelaksanaan kegiatan bidang pencegahan dan pemberdayaan masyarakat serta pemadaman, penyelamatan dan sarana prasarana;
- b. pengelolaan dan penyelenggaraan kegiatan bidang pencegahan dan pemberdayaan masyarakat serta

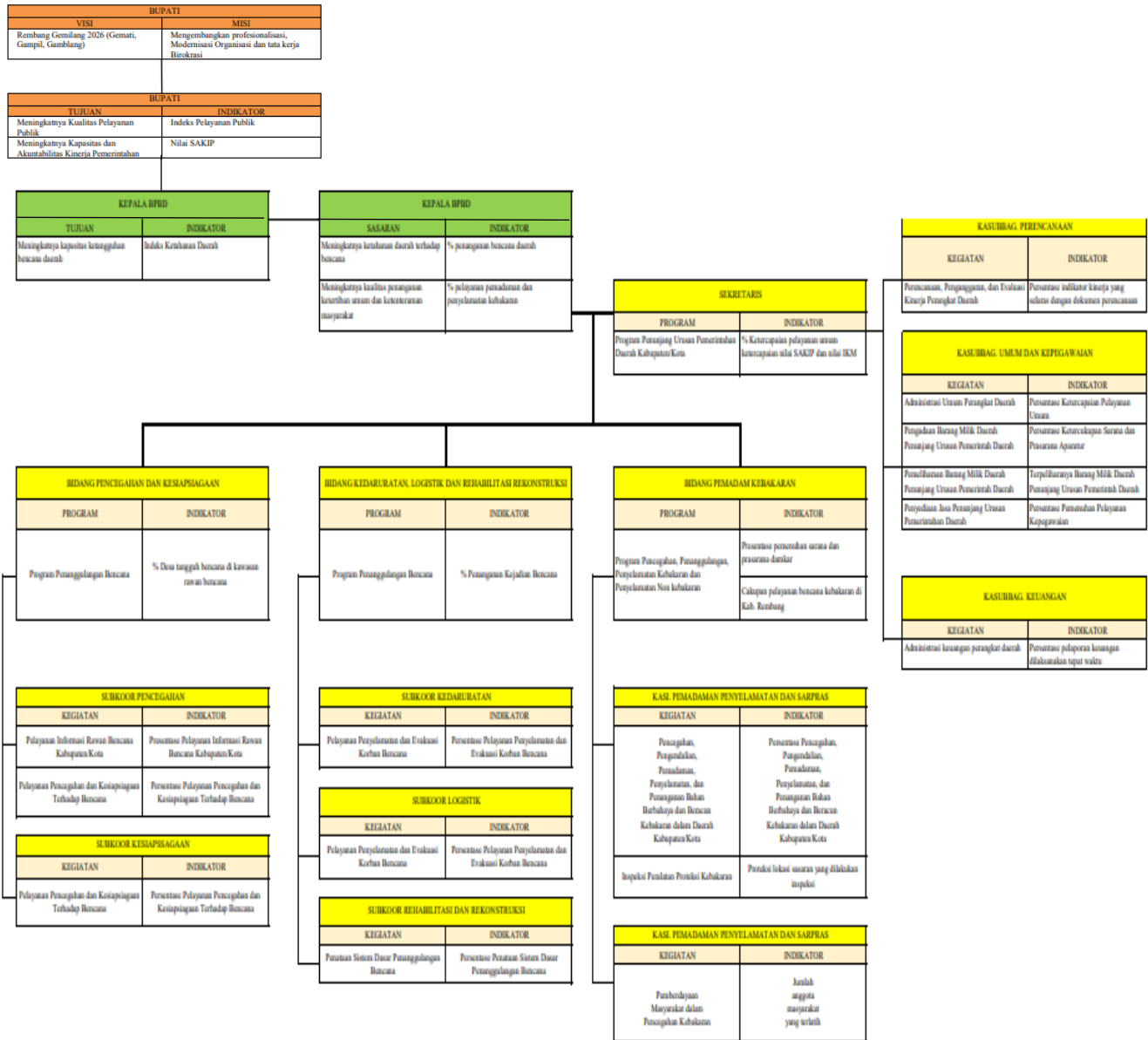
- pemadaman, penyelamatan dan sarana prasarana untuk mendukung kelancaran pelaksanaan tugas dan fungsi dinas;
- c. pengkoordinasian dan pengendalian pelaksanaan kegiatan bidang pencegahan dan pemberdayaan masyarakat serta pemadaman, penyelamatan dan sarana prasarana;
 - d. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh pimpinan.

B. Cascading Kinerja

Untuk memberikan kontribusi pada pencapaian visi, misi, tujuan dan sasaran pembangunan sebagaimana diamanatkan dalam Peraturan Daerah Kabupaten Rembang Nomor 2 Tahun 2021 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Tahun 2021-2026. BPBD Kabupaten Rembang dibentuk dengan skema kinerja sebagai berikut:

Gambar 1.1 Cascading Organisasi

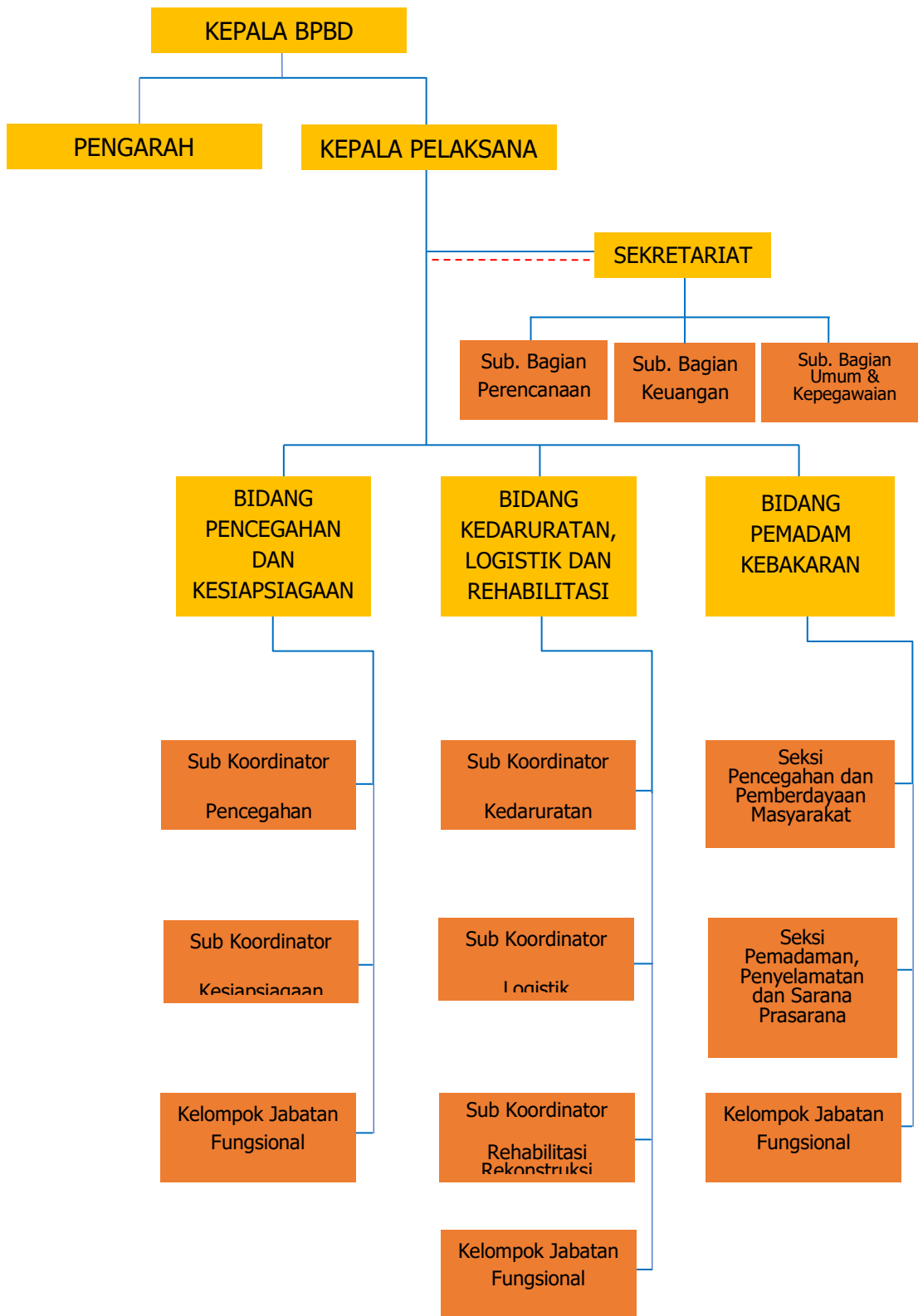
CASCADING BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH KABUPATEN REMBANG BERDASARKAN PEMUTAKHIRAN PERMENDAGRI NO. 90 TAHUN 2019



C. Struktur Organisasi

Untuk mendukung pelaksanaan tugas dan fungsi sebagaimana diuraikan di atas, disusunlah struktur organisasi dan tatarkerja Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Rembang. Berikut bagan struktur organisasi Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Rembang.

Gambar 1.2 Struktur Organisasi Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Rembang



Sumber : Peraturan Bupati Nomor 77 Tahun 2021

D. Susunan Kepegawaian

Kualifikasi pegawai Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Rembang per Desember 2024 adalah sebagai berikut:

**Tabel 1.1 Data Kepegawaian BPBD Kabupaten Rembang
Tahun 2024**

NO	DATA PEGAWAI	PNS		NON PNS		P3K	
		L	P	L	P	L	P
1	Kualifikasi Pendidikan						
	SD	-	-	1	-	-	-
	SMP	1	-	-	-	-	-
	SMA	20		12	-	13	1
	D3	1	2	2	-	-	-
	D4	2	-	-	-	-	-
	S1	8	2	4	3	-	-
	S2	4	3	-	-	-	-
2	Pangkat dan Golongan						
	Non Golongan	-	-	19	3	-	-
	Golongan I	-	-	-	-	-	-
	Golongan II	10	1	-	-	-	-
	Golongan III	21	5	-	-	-	-
	Golongan IV	5	1	-	-	-	-
	Golongan V	-	-	-	-	13	1
3	Jumlah Pejabat						
	Pejabat Struktural						
	Pejabat Fungsional						
	Jumlah Pegawai	36	7	19	3	13	1
	Jumlah Total Pegawai	43		22		14	

E. Sarana dan Prasarana

Kondisi sarana dan prasarana Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Rembang per Desember 2024 adalah sebagai berikut:

Tabel 1.2 Data Sarana dan Prasarana Tahun 2024

<i>No</i>	<i>Uraian</i>	<i>Jumlah</i>	<i>Merk</i>	<i>Kondisi</i>
I. Alat-alat Kantor dan Rumah Tangga				
1.	Laptop	1	Lenovo pad flex 14-59412881 IPK	Baik
2.	Laptop	1	Asus A450LCWX048D Gray MTD	Baik
3.	Laptop	2	HP	Baik
4.	Laptop	1	Acer	Baik
5.	Laptop	1	Tosiba L40 intel core i5	Baik
6.	Laptop	1	Tosiba L40 intel core i5	Baik
7.	Laptop	1		Baik
8.	Printer	1	HP Laser CIR 1025	Baik
9.	Printer	1	Brother	Baik
10.	Printer	1	Laserjet hp p1102+ catride toner	Baik
11.	Printer	2	Epson Stylus T60	Baik
12.	Printer	3	Epson	Baik
13.	Printer	1	Epson ME 32	Baik
14.	Printer	1		Baik
15.	Printer Portable	1	HP	Baik
16.	Printer	1	Epson L5290	Baik
17.	Scanner	1	1221 scan AS 1213	Baik
18.	PC Unit	2	Acer, Core i3, 4130,2gb,HDD 500 gb wi fi DVD RW, LED 19,5"	Baik
19.	PC Unit	1	Asus Power Logic H61 ITERA 2GB LCD SAMSUNG 19"	Baik
20.	Tablet/Komputer	1	Lenovo	Baik
21.	Meja kerja Staf	5		Baik
22.	Meja rapat	10		Baik
23.	Meja rapat oval	1		Baik
24.	Meja kursi tamu Eselon III	3		Baik
25.	Meja panjang	1		Baik
26.	Meja setengah lingkaran	1		Baik
27.	Meja Komputer	1		Baik
28.	Meja Kerja	5		Baik
29.	Meja Podium	1		Baik
30.	Kursi kerja staf/putar	5	Tiger	Baik
31.	kursi rapat	6		Baik

No	Uraian	Jumlah	Merk	Kondisi
32.	Kursi lipat	25		Baik
33.	Kursi Kerja	8		Baik
34.	Almari tanpa kaca/Bufet	1		Baik
35.	Almari Arsip	1		Baik
36.	Almari Pajangan	2		Baik
37.	Rak Kayu	4		Baik
38.	Rak Koran	1		Baik
39.	Hiasan dinding batik besar	1	Hiasan dinding	Baik
40.	Hiasan dinding batik kecil	2	Hiasan dinding	Baik
41.	Pemotong rumput	1	Honda	Baik
42.	Gorden, taplak meja	1		Baik
43.	Rice cooker	2	Cosmos CRJ 326	Baik
44.	Ac Split	4	LG	Baik
45.	Ac Split	4	Daikin	Baik
46.	Laptop	1	Acer Aspire 5	Baik
47.	Laptop	1	Lenovo	Baik
48.	WC Portable	2		Baik
II. Alat Studio dan Alat Komunikasi				
1	Sound System	1	Sound crest SC EBL 15A	Baik
2	Handycam	1		Baik
3	Camera Elektronik	1	Panasonic FZ 47"	Baik
4	Drone	1	Mi	Baik
5	Repeater	1		
6	HT	38		
7	Rig	1		
III. Alat Keamanan				
1.	SCUBA / alat selam	1		Baik
2.	SCBA /jarring	1		Baik
3.	Basket Stretcher	1		Baik
4.	Action Camera	1		Baik
5.	Senter Tactical	2		Baik
6.	Las Listrik	1		Baik
7.	Bor	1		Baik
8.	Gerindra	1		Baik
9.	Kompresor	1		Baik
10.	Antena HT	10		Baik
11.	Megaphone	2		Baik
12.	Chainsaw	10		Baik
IV. Aset Tetap Lainnya, Buku dan Perpustakaan				
1	Buku Peraturan	1		Baik

No	Uraian	Jumlah	Merk	Kondisi
V. Transportasi				
1.	Kendaraan Roda 2	18		Baik
2.	Kendaraan Roda 4 Operasional	4		Baik
3.	Mobil Pick Up	2		Baik
4.	Mobil Tangki Air Bersih+Pemadam	4		Baik
5.	Truk Pemadam	5		Baik

1.3.2 Anggaran

Sumber dan besaran anggaran yang dimiliki oleh Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Rembang. Berikut adalah Anggaran yang dimiliki oleh Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Rembang :

Tabel 1.3 Anggaran BPBD Tahun 2024

Uraian	Jumlah (Rp)
Belanja Operasi	Rp 6.850.558.455
Belanja Pegawai	Rp 4.899.731.455
Belanja Barang dan Jasa	Rp 1.950.827.000
Belanja Modal	Rp 48.282.300
Belanja Modal Peralatan dan Mesin	Rp 48.282.300
Total	Rp 6.898.840.755

Sumber : DPA SKPD Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Rembang

Pada tahun 2024 anggaran pada Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Rembang mengalami penurunan daripada tahun sebelumnya, seperti pada tabel berikut:

Tabel 1.4 Perbandingan Anggaran Tahun 2023 dan Tahun 2024

Sumber	Tahun	Jumlah
(1)	(2)	(3)
APBD	Tahun 2023	Rp. 9.640.085.502
APBD	Tahun 2024	Rp. 6.898.786.955
Sumber Lainnya (Jika Ada)		Rp. -

Sumber : DPA SKPD Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Rembang

1.4 Isu-Isu Strategis Dalam Renstra BPBD Tahun 2022-2026

Isu strategis adalah kondisi atau hal yang harus diperhatikan atau dikedepankan dalam perencanaan pembangunan karena memiliki pengaruh besar terhadap pencapaian sasaran, merupakan tugas dan tanggungjawab OPD, dampaknya yang signifikan bagi entitas (daerah/masyarakat), memiliki daya ungkit pembangunan daerah, kemudahan untuk ditangani serta prioritas politik yang perlu diwujudkan di masa datang.

Permasalahan penyelenggaraan penanggulangan bencana dalam RPJMD 2022-2026 adalah belum optimalnya pencegahan dan kesiapsiagaan bencana. Berdasarkan hasil analisis terhadap permasalahan dalam perencanaan pembangunan daerah di Kabupaten Rembang, maka isu strategis yang dapat diidentifikasi adalah masih terjadinya resiko bencana. Permasalahan-permasalahan yang ditemui dan perlu untuk segera disikapi secara menyeluruh antara lain adalah:

- a. Belum optimalnya penyampaian informasi bencana kepada masyarakat di kawasan rawan bencana
- b. Belum optimalnya edukasi bencana bagi warga di kawasan rawan bencana Belum terfasilitasinya gedung BPBD yang berfungsi untuk menyimpan logistik dan peralatan bencana
- c. Masih terbatasnya sarana peralatan dan mobilitas penanggulangan bencana
- d. Masih terbatasnya ketersediaan logistik, guna memenuhi kebutuhan dasar masyarakat terdampak bencana di Kabupaten Rembang
- e. Belum lengkapnya pedoman dan dokumen penyelenggaraan penanggulangan bencana di Kabupaten Rembang
- f. Belum terfasilitasinya pembentukan desa tangguh bencana di seluruh desa rawan bencana Kabupaten Rembang
- g. Belum memadainya peran serta masyarakat dan dunia usaha dalam penyelenggaraan penanggulangan bencana di Kabupaten Rembang
- h. Rendahnya kepedulian masyarakat dalam upaya pencegahan dan pemadaman kebakaran

- i. Kurangnya pengetahuan masyarakat dalam cara penanganan kebakaran yang benar
- j. Kurang maksimal layanan pemadam kebakaran terhadap jarak lokasi kebakaran dikarenakan belum adanya UPT Pos Damkar dan armada hanya terpusat di Pos Damkar.

1.5 Tindak Lanjut atas Laporan Hasil Evaluasi SAKIP Tahun 2023

Tindak lanjut laporan hasil evaluasi SAKIP Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Rembang tahun 2023 sebagai berikut:

Tabel 1.5 Tindak Lanjut Laporan Hasil Evaluasi SAKIP BPBD Tahun 2023

A. Perencanaan Kinerja

NO	REKOMENDASI	RENCANA AKSI TINDAK LANJUT	DOUT PUT		STATUS/PROGRES PENYELESAIAN	LINK BUKTI DUKUNG TINDAK LANJUT
			SATUAN	URAIAN		
1	2	3	4	5	6	7
1	Mengusulkan kepada unit organisasi pengampu perihal penertiban pedoman penyusunan dokumen rencana aksi akuntabilitas kinerja perangkat daerah	telah mengusulkan kepada unit organisasi pengampu perihal penertiban pedoman penyusunan dokumen rencana aksi akuntabilitas kinerja perangkat daerah	dokumen	Pedoman penyusunan dokumen rencana aksi akuntabilitas kinerja perangkat daerah	Tuntas	https://drive.google.com/file/d/1UjwMh1E0z0w0t3u00v3F3K15M1H0j/view?usp=sharing
2	Mempublikasikan dokumen perencanaan kinerja pada web resmi BPBD agar dibuat sesuai nama dokumen, tidak digabung pada satu link "Dokumen SAKIP"	Telah mempublikasikan dokumen perencanaan kinerja pada web resmi BPBD sesuai nama dokumen	dokumen	Dokumen perencanaan kinerja	Tuntas	https://bpbddrembangkab.go.id/dokumen/
3	Memperbaiki dokumen pohon kinerja yang menggambarkan hubungan sebab-akibat atau jika-maka dari pencapaian kinerja dan memperjelas Crosscutting antar bidang dengan memperhatikan kaidah penjenjangan kinerja sesuai Peraturan Menteri PAN-RB Nomor 89 Tahun 2021	Telah memperbaiki dokumen pohon kinerja yang menggambarkan hubungan sebab-akibat atau jika-maka dari pencapaian kinerja dan memperjelas Crosscutting antar bidang dengan memperhatikan kaidah penjenjangan kinerja sesuai Peraturan Menteri PAN-RB Nomor 89 Tahun 2021	dokumen	Dokumen Pohon Kinerja	Tuntas	https://drive.google.com/file/d/1Rq5GdAmy3cg8Mx0MSh9swP1F1WGR2Q/view?usp=sharing
4	Melakukan pemantauan pelaksanaan rencana aksi dan pencapaian kinerja secara berkala dengan melibatkan seluruh PPTK/Pejabat Struktural maupun Fungsional yang diadministrasikan dan didokumentasikan secara tertib	Telah melakukan pemantauan pelaksanaan rencana aksi dan pencapaian kinerja secara berkala dengan melibatkan seluruh PPTK/Pejabat Struktural maupun Fungsional yang diadministrasikan dan didokumentasikan secara tertib	Laporan	Laporan Capaian Kinerja	Tuntas	https://docs.google.com/spreadsheets/d/1Vv3t5M4tDhwgQ0wcyWkxgEHGsW0E7K7/edit?usp=sharing&oid=1J4164815021826458101&rtof=true&mt=true

B. Pengukuran Kinerja

NO	REKOMENDASI	RENCANA AKSI TINDAK LANJUT	OUT PUT		STATUS/PROGRES PENYELESAIAN	LINK BUKTI DUKUNG TINDAK LANJUT
			SATAUN	URAIAN		
1	2	3	4	5	6	7
1	Mengusulkan kepada unit organisasi pengampu (bagian Administrasi Pembangunan Selda) perihal penerbitan pedoman teknis pengukuran kinerja dan pengumpulan data kinerja	Telah mengusulkan perihal pedoman teknis pengukuran kinerja dan pengumpulan kinerja	dokumen	pedoman teknis pengumpulan kinerja	Tuntas	https://drive.google.com/file/d/1N5ApW3tQuEWwiT9ngPpVfP9cU4Nr5C/view?usp=sharing
2	Melengkapi profil indikator Kinerja dengan definisi operasional program/kegiatan	Telah melengkapi profil indikator Kinerja dengan definisi operasional program/kegiatan	dokumen	Profil Indikator Kinerja	Tuntas	https://drive.google.com/file/d/169bNRYnsPX1XbvaZ-VdusYtisYKOKa5v/view?usp=sharing
3	Dalam pengambilan keputusan pada saat proses pengukuran kinerja organisasi diharapkan pimpinan senantiasa terlibat langsung dan didokumentasikan/diadministrasikan secara tertib	Telah mendokumentasikan kegiatan pelaksanaan pengukuran kinerja organisasi dengan melengkapi daftar hadir notulen	dokumen	notulen daftar hadir pelaksanaan pengukuran kinerja organisasi	Tuntas	https://drive.google.com/file/d/19wchEwPCFGlrvgNlqhn2f_WaXZ5RDE4I/view?usp=sharing
4	Menyusun laporan hasil monitoring/evaluasi pelaksanaan renja triwulanan 1 dan 2 Tahun 2024	Telah menyusun laporan hasil monitoring/evaluasi pelaksanaan renja triwulanan 1 dan 2 Tahun 2024	laporan	laporan hasil monitoring/evaluasi pelaksanaan renja triwulanan 1 dan 2 Tahun 2024	Tuntas	https://docs.google.com/spreadsheets/d/1Vv3t5M4tOHwqQdweyIWkaHtEGsW06TX7/edit?usp=sharing&oid=114164815021826458101&rtop=true&sd=true
5	Agar pengukuran sepenuhnya fokus pada pengukuran capaian kinerja mulai dari sasaran/program/kegiatan sampai pada sub kegiatan hendaknya dilaksanakan secara berkala (minimal triwulanan) dengan melibatkan seluruh pejabat struktural termasuk PPTK selaku penanggungjawab sekaligus pengendali teknis kegiatan	Telah mencantumkan pengukuran kinerja pada sub kegiatan yang dilaksanakan secara berkala (triwulanan) dengan melibatkan seluruh pejabat struktural termasuk PPTK selaku penanggungjawab sekaligus pengendali teknis kegiatan	dokumen	pengukuran kinerja pada dokumen LKJIP	Tuntas	https://drive.google.com/file/d/1KlQ_xalpaAV-AF_nHlUT4ayZaiZwoob7/view?usp=sharing
6	Untuk melakukan berkoordinasi dengan Bagian administrasi pembangunan Selda dalam pelaporan atas capaian kinerja BPBD	Sudah berkoordinasi perihal pelaporan atas capaian kinerja BPBD	dokumen	Capaian Kinerja	Tuntas	https://drive.google.com/drive/folders/1Tr355NccButVahs-sRpOYKCM41Zh2?usp=sharing

C. Pelaporan Kinerja

NO	REKOMENDASI	RENCANA AKSI TINDAK LANJUT	OUT PUT		STATUS/PROGRES PENYELESAIAN	LINK BUKTI DUKUNG TINDAK LANJUT
			SATAUN	URAIAN		
1	2	3	4	5	6	7
1	Mempublish Laporan Kinerja pada website BPBD	Telah mempublish Laporan Kinerja pada website BPBD	dokumen	dokumen LKJIP tahun 2023	Tuntas	https://bpsbd.rembangkab.go.id/documents/
2	Mendokumentasikan/administrasikan Laporan Kinerja secara tertib	Telah mendokumentasikan/administrasikan Laporan Kinerja secara tertib	dokumen	dokumen Laporan Kinerja	Tuntas	https://drive.google.com/drive/folders/1HUvHy83QHtX6FkaGDbe-82u-fXnxlqd?usp=sharing
3	Melengkapi dokumen Laporan kinerja dengan informasi perbandingan realisasi program/kegiatan/sub kegiatan	telah menyempurnakan dan merevisi LKJIP tahun 2023	dokumen	dokumen LKJIP tahun 2023 hasil reuiv	Tuntas	https://drive.google.com/file/d/1EaLjVr5uXQOe1Ob82M9QJRd8Shy7dnr1Vlew?usp=sharing
4	Untuk menyajikan analisis dan evaluasi realisasi kinerja yang sejenis dengan level PD di lingkungan Kabupaten Rembang/Kabupaten tetangga/Provinsi/nasional (Benchmark Kinerja) beserta analisa & penjelasannya	telah menyampaikan informasi analisis dan evaluasi realisasi kinerja pada level perangkat daerah skitar kab/dalam wilayah	dokumen	dokumen evaluasi realisasi kinerja	Tuntas	https://docs.google.com/spreadsheets/d/12CjttEoxy_klibngTRI7R2KvBzH5QA/edit?usp=sharing&oid=114164815021826458101&rtop=true&sd=true
5	Menginformasikan analisa/penjelas faktor pendukung atas keberhasilan kinerja dan faktor penghambat/kendala atas kegagalan yang dihadapi beserta upaya upaya yang akan dilakukan	Telah menginformasikan analisa/penjelas faktor pendukung atas keberhasilan kinerja dan faktor penghambat/kendala atas kegagalan yang dihadapi beserta upaya upaya yang akan dilakukan	dokumen	dokumen LKJIP tahun 2023 hasil reuiv	Tuntas	https://drive.google.com/file/d/1EaLjVr5uXQOe1Ob82M9QJRd8Shy7dnr1Vlew?usp=sharing

1.6 Sistematika Laporan Kinerja

Penyusunan Laporan Kinerja Instansi Pemerintah Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Rembang Tahun 2024 adalah:

BAB I PENDAHULUAN

Bab ini menyajikan penjelasan umum organisasi berfokus pada aspek strategis organisasi dan permasalahan utama (*strategic issued*) yang sedang dihadapi.

BAB II PERENCANAAN KINERJA

Bab ini menguraikan ringkasan/ikhtisar perjanjian kinerja tahun yang bersangkutan.

BAB III AKUNTABILITAS KINERJA

3.1 Capaian Kinerja Organisasi

Capaian kinerja organisasi untuk setiap pernyataan kinerja sasaran strategis organisasi disesuaikan dengan hasil pengukuran kinerja organisasi.

3.2 Realisasi Anggaran

Realisasi anggaran yang digunakan dan yang telah digunakan untuk mewujudkan kinerja organisasi diuraikan sesuai dengan dokumen Perjanjian Kinerja.

BAB IV PENUTUP

Bab ini menguraikan simpulan secara umum atas capaian kinerja organisasi serta langkah di masa mendatang yang akan dilakukan organisasi untuk meningkatkan kinerjanya.

LAMPIRAN

- 1 Perjanjian Kinerja Tahun 2024
- 2 Prestasi yang diraih
- 3 Lain-lain yang dianggap perlu.

BAB II

PERENCANAAN KINERJA

2.1 Tujuan dan Sasaran Perangkat Daerah

Prioritas pembangunan tahun 2026 mengacu pada arah kebijakan pembangunan nasional yang merupakan pedoman untuk merumuskan prioritas dan sasaran pembangunan nasional serta rencana program dan kegiatan pembangunan daerah yang dilakukan melalui pendekatan politik, teknokratik, partisipatif, bottom-up dan top-down, holistik-tematik, integratif, spasial, dan pentahelix. Keberhasilan pembangunan nasional adalah keberhasilan dari pencapaian semua sasaran dan prioritas serta program dan kegiatan pembangunan daerah yang ditetapkan dalam RKP dan dilaksanakan secara nyata oleh semua pemangku kepentingan. Oleh karena itu, perencanaan Pembangunan daerah Kabupaten Rembang Tahun 2026 disusun dengan berpedoman pada Prioritas Pembangunan Nasional dan RKPD Provinsi Jawa Tengah Tahun 2026.

Visi Pembangunan Pemerintah Kabupaten Rembang yang ingin dicapai selama lima tahun mendatang sebagaimana telah dirumuskan dalam RPJMD Kabupaten Rembang 2022-2026 adalah “Rembang Gemilang 2026”.

Sebagai upaya mewujudkan Visi Pembangunan Kabupaten Rembang Tahun 2022-2026, telah dirumuskan empat Misi. Salah satu dari empat rumusan Misi tersebut terkait langsung dengan penyelenggaraan penanggulangan bencana, yaitu Misi I “Mengembangkan profesionalisasi, modernisasi organisasi dan tata kerja birokrasi”. Dalam melaksanakan Misi I, telah dijabarkan melalui penetapan tujuan strategis BPBD Kabupaten Rembang yaitu meningkatnya kapasitas ketangguhan bencana daerah. Berikut adalah indikator kinerja dan target kinerja Tujuan dan Sasaran Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Rembang:

Tabel 2.1 Tujuan, Sasaran, Indikator, dan Target Kinerja Perangkat Daerah Tahun Periode Rencana Strategis

No	Tujuan	Sasaran		Indikator Kinerja	Target Kinerja pada Tahun					
					2021	2022	2023	2024	2025	2026
(1)	(2)	(3)		(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)
1	Meningkatnya kapasitas ketangguhan bencana daerah			Indeks Ketahanan Daerah	NA	0,57	0,59	0,61	0,63	0,65
		1.1	Meningkatnya ketahanan daerah terhadap bencana	Presentase penanganan bencana daerah	NA	74%	79%	84%	89%	94%
		1.2	Meningkatnya kualitas penanganan ketertiban umum dan ketenteraman masyarakat	Persentase pelayanan pemadaman dan penyelamatan kebakaran	NA	80%	85%	85%	90%	90%

Sumber : Renstra Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Rembang Tahun 2021-2026

Adapun penyajian Indikator Kinerja Utama Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Rembang adalah sebagai berikut:

Tabel 2.2 Indikator Kinerja Utama Perangkat Daerah Tahun 2024

No	Tujuan/ Sasaran Strategis	Indikator Kinerja		Satuan	Penjelasan		
					Definisi Operasional	Formulasi/ Rumus Perhitungan	Sumber Data
(1)	(2)	(3)		(4)	(5)	(6)	(7)
1	Meningkatnya kapasitas ketangguhan bencana daerah	1.1.1.1	Indeks Ketahanan Daerah	Angka	Informasi mengenai kemampuan suatu daerah dalam menghadapi bencana	0,02 + IKD	BPBD

Sumber: Indikator Kinerja Utama Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Rembang Tahun 2024

2.2 Rencana Kinerja Tahun 2024

Perencanaan Kinerja dalam Renstra Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Rembang untuk mencapai tujuan dan sasaran

jangka menengah yang selaras dengan strategi dan kebijakan daerah serta rencana program prioritas dalam RPJMD. Strategi dan kebijakan jangka menengah Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Rembang menunjukkan bagaimana cara mencapai tujuan dan sasaran jangka menengah, target kinerja hasil (*outcome*) program prioritas RPJMD yang menjadi tugas dan fungsi dari Perangkat Daerah. Strategi dan arah kebijakan merupakan rumusan perencanaan komprehensif tentang bagaimana Perangkat Daerah mencapai tujuan dan sasaran dengan efektif.

Perencanaan Kinerja BPBD Kabupaten Rembang merupakan penjabaran dari tujuan, sasaran dan program yang telah ditetapkan dalam Rencana Strategis BPBD Kabupaten Rembang Tahun 2022-2026. Strategi yang digunakan dalam rangka pencapaian sasaran adalah peningkatan profesionalisme SDM dan Kebijakan yang diambil dalam rangka pelaksanaan strategi adalah melaksanakan reformasi birokrasi melalui pemanfaatan teknologi informasi dan mengembangkan kebijakan pengelolaan pemerintahan yang efektif dan efisien. Berikut Rencana Kinerja BPBD Kabupaten Rembang Tahun 2024:

Tabel 2.3 Rencana Kinerja Tahun 2024 Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Rembang

No	Tujuan	Sasaran	Indikator Kinerja	Satuan	Target	Strategi	Kebijakan
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)		
1	Meningkatnya kapasitas ketangguhan bencana daerah		Indeks Ketahanan Daerah	Angka	0,61	Peningkatan profesionalisme SDM	Melaksanakan reformasi birokrasi 2. melalui pemanfaatan teknologi 3. informasi dan mengembangkan 4. kebijakan pengelolaan pemerintahan 5. yang efektif dan efisien
		Meningkatnya ketahanan daerah terhadap bencana	Presentase penanganan bencana daerah	%	84		
		Meningkatnya kualitas penanganan ketertiban umum dan ketenteraman masyarakat	Persentase pelayanan pemadaman dan penyelamatan kebakaran	%	85		

Sumber : Rencana Kerja Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Rembang tahun 2024

2.3 Perjanjian Kinerja Tahun 2024

Dokumen Perjanjian Kinerja (PK) merupakan dokumen yang berisikan penugasan dari pimpinan instansi yang lebih tinggi kepada pimpinan instansi yang lebih rendah untuk melaksanakan program/kegiatan yang disertai dengan indikator kerjanya. Perencanaan kinerja yang dilakukan oleh instansi akan dapat berguna untuk menyusun prioritas kegiatan yang dibiayai dari sumber dana yang terbatas. Dengan perencanaan kinerja tersebut diharapkan fokus dalam mengarahkan dan mengelola program atau kegiatan instansi akan lebih baik, sehingga diharapkan tidak ada kegiatan instansi yang tidak terarah. Adapun Perjanjian Kinerja oleh Kepala Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Rembang tahun 2024 adalah sebagai berikut:

Tabel 2.4 Perjanjian Kinerja Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Rembang Tahun 2024

No	Tujuan	Sasaran Strategis		Indikator Kinerja	Target
(1)	(2)		(3)	(4)	(5)
1	Meningkatnya kapasitas ketangguhan bencana daerah			Indeks Ketahanan Daerah	0,61
		1	Meningkatnya ketahanan daerah terhadap bencana	Presentase penanganan bencana daerah	84%
		2	Meningkatnya kualitas penanganan ketertiban umum dan ketenteraman masyarakat	Persentase pelayanan pemadaman dan penyelamatan kebakaran	85%

Sumber : Perjanjian Kinerja Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Rembang Tahun 2024

Dalam rangka pencapaian kinerja yang telah ditetapkan, dilaksanakan program dan kegiatan sesuai dengan Perjanjian Kinerja dan selaras dengan Dokumen Pelaksanaan Anggaran (DPA) yang telah ditetapkan. Berikut rincian program, kegiatan, dan sub kegiatan Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Rembang:

**Tabel 2.5 Program, Kegiatan, dan Sub Kegiatan
Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Rembang
Tahun 2024**

Tujuan/ Sasaran	Indikator Kinerja	No .	Program/Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja	Target
			(2)	(3)	(4)
Meningkatnya kapasitas ketangguhan bencana	Indeks Ketahanan Daerah	1.1	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Nilai IKM OPD BPBD Nilai SAKIP OPD BPBD	85 73
		1.1 .1	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Presentase pelaporan keuangan dengan kualitas baik	100%
		1.1. 1.1	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	55 orang/bulan
		1.1. 1.1. 2	Pelaksanaan Penatausahaan dan Penguji/Verifikasi Keuangan SKPD	Jumlah Dokumen Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	12 Dokumen
		1.1 .2	Administrasi Umum Perangkat Daerah	Persentase Ketercapaian Pelayanan Umum	100%
		1.1. 2.1	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/ Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	12 Paket
		1.1. 2.2	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan	12 Paket
		1.1. 2.3	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	12 Paket
		1.1. 2.4	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetak dan Penggandaan yang Disediakan	12 Paket
		1.1. 2.5	Penyediaan Bahan / material	Jumlah Paket Bahan/Material yang Disediakan	12 Paket
		1.1. 2.6	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi Dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	12 Laporan
		1.1 .3	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota	Persentase Pemenuhan Pelayanan Kepegawaian	100%
		1.1. 3.1	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat	12 Laporan

Tujuan/ Sasaran	Indikator Kinerja	No .	Program/Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja	Target
			(2)	(3)	(4)
		1.1. 3.2	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	12 Lapora n
		1.1. 3.3	Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan	12 Lapora n
		1.1. 3.4	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	12 Lapora n
		1.1 .4	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Terpeliharanya Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	100%
		1.1. 4.1	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya	8 Unit
		1.1. 4.2	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	45 Unit
		1.1. 4.3	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah Gedung Ka dan Bangunan Lain yang Dipelihara/Direhabilitasi	3 Unit
Meningkatn ya ketahanan daerah terhadap bencana	Presentase penangana n bencana daerah	1.2	PROGRAM PENANGGULANGAN BENCANA	% desa tangguh bencana di kawasan rawan bencana % penanganan kejadian bencana	49,18% 100 %
		1.2 .1	Pelayanan Informasi Rawan Bencana Kabupaten/Kota	Presentase Pelayanan Informasi Rawan Bencana Kabupaten/Kota	100%
		1.2. 1.1	Penyusunan Kajian Risiko Bencana Kabupaten/Kota	Jumlah dokumen Kajian Risiko Bencana (KRB) sampai dengan dinyatakan sah/legal paling lama dalam 1 (satu) tahun	1 dokum en
		1.2 .2	Pelayanan Pencegahan dan Kesiapsiagaan Terhadap Bencana	Persentase Pelayanan Pencegahan dan Kesiapsiagaan Terhadap Bencana	100%
		1.2. 2.1	Penguatan Kapasitas Kawasan untuk Pencegahan dan Kesiapsiagaan	Jumlah Kawasan yang Ditingkatkan Kapasitasnya dalam Pencegahan dan Kesiapsiagaan Bencana	2 Kawas an
		1.2. 2.2	Pengembangan Kapasitas Tim Reaksi Cepat (TRC) Bencana Kabupaten/Kota	Jumlah Personil TRC yang Dikembangkan Kapasitas Teknis dan Manajerialnya	400 Orang

Tujuan/ Sasaran	Indikator Kinerja	No .	Program/Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja	Target
			(2)	(3)	(4)
		1.2. 2.3	Penyediaan Peralatan Perlindungan dan Kesiapsiagaan Terhadap Bencana kabupaten/kota	Jumlah Peralatan Penyelamatan Diri bagi Individu Warga Negara, Keluarga, maupun Petugas sesuai dengan jenis ancaman bencana di kawasan tempat tinggalnya	11 Unit
		1.2 .3	Pelayanan Penyelamatan dan Evakuasi Korban Bencana	Persentase Pelayanan Penyelamatan dan Evakuasi Korban Bencana	100%
		1.2. 3.1	Penyediaan Logistik Penyelamatan dan Evakuasi Korban Bencana Kabupaten/Kota	Jumlah Korban Bencana yang Mendapatkan Distribusi Logistik Penyelamatan dan Evakuasi Korban Bencana	50 Orang
		1.2 .4	Penataan Sistem Dasar Penanggulangan Bencana	Persentase Penataan Sistem Dasar Penanggulangan Bencana	49%
		1.2. 4.1	Penyusunan Kajian Kebutuhan Pascabencana (JITUPASNA) dan Rencana Rehabilitasi dan Rekontruksi Pascabencana (R3P) Kab/Kota	Jumlah penyelesaian dokumen Pengkajian Kebutuhan Pascabencana dan Rencana Rehabilitasi dan Rekonstruksi Pascabencana (R3P) Kab/Kota sampai dengan dinyatakan sah dan legal paling lama dalam 1 (satu) tahun	3 Doku men
Meningkatn ya kualitas penangan an ketertiban umum dan ketenteram an masyarakat	Persentase pelayanan pemadama n dan penyelamat an kebakaran	1.3	PROGRAM PENCEGAHAN, PENANGGULANGAN, PENYELAMATAN KEBAKARAN DAN PENYELAMATAN NON KEBAKARAN	cakupan pelayanan bencana kebakaran di Kabupaten Rembang % sarana prasarana pemadam kebakaran yang representatif	40 % 40 %
		1.3 .1	Pencegahan, Pengendalian, Pemadaman, Penyelamatan, dan Penanganan Bahan Berbahaya dan Beracun Kebakaran dalam Daerah Kabupaten/Kota	persentase warga negara yang memperoleh layanan penyelamaan evakuasi korban kebakaran	80%
		1.3. 1.1	Pemadaman dan Pengendalian Kebakaran dalam Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Laporan Hasil Pelaksanaan Kegiatan Kesiapsiagaan Petugas Piket dan Pemadaman Kebakaran dalam Daerah Kabupaten/Kota	11 Lapora n
		1.3. 1.2	Penyelamatan dan Evakuasi Korban Kebakaran dan Non Kebakaran	Jumlah Dokumen Hasil Pelaksanaan Kegiatan Kesiapsiagaan Petugas Piket dan Penyelamatan/Evakuasi Saat	1 Doku men

Tujuan/ Sasaran	Indikator Kinerja	No .	Program/Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja	Target
			(2)	(3)	(4)
				Penanggulangan Kebakaran dan Non Kebakaran	
		1.3. 1.3	Pengadaan Sarana dan Prasarana Pencegahan, Penanggulangan Kebakaran dan Alat Pelindung Diri	Jumlah Sarana dan Prasarana Untuk Pencegahan dan Penanggulangan Kebakaran dan Alat Pelindung Diri yang Sah dan Legal Sesuai Standar Teknis Terkait	1 Unit
		1.3 .2	Pemberdayaan Masyarakat dalam Pencegahan Kebakaran	jumlah anggota relawan yang terlatih	80%
		1.3. 2.1	Pemberdayaan Masyarakat dalam Pencegahan dan Penanggulangan Kebakaran Melalui Sosialisasi dan Edukasi Masyarakat	Jumlah Warga Masyarakat yang Mendapatkan Sosialisasi Edukasi Pencegahan dan Penanggulangan Kebakaran Setiap Tahunnya	210 orang

Sumber : DPA SKPD Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Rembang Tahun Anggaran 2024

BAB III

AKUNTABILITAS KINERJA

3.1 Capaian Kinerja Perangkat Daerah

Akuntabilitas kinerja adalah kewajiban untuk menjawab dari perorangan, badan hukum atau pimpinan kolektif secara transparan mengenai keberhasilan atau kegagalan dalam melaksanakan misi organisasi kepada pihak-pihak yang berwenang menerima laporan akuntabilitas/pemberi amanah. Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Rembang selaku pengemban amanah masyarakat melaksanakan kewajiban berakuntabilitas melalui penyajian Laporan Kinerja Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Rembang yang dibuat sesuai ketentuan yang diamanatkan dalam Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 dan Peraturan Menteri PANRB Nomor 53 Tahun 2014. Laporan tersebut memberikan gambaran penilaian tingkat pencapaian target masing-masing indikator tujuan dan sasaran strategis yang ditetapkan dalam dokumen Renstra PD Tahun 2021-2026 dan Perjanjian Kinerja Tahun 2024. Sesuai dengan ketentuan tersebut, pengukuran kinerja digunakan untuk menilai keberhasilan dan kegagalan pelaksanaan kegiatan sesuai dengan program, sasaran yang ditetapkan untuk mewujudkan Tujuan dan Sasaran Kinerja Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Rembang.

Pengukuran kinerja digunakan untuk menilai keberhasilan dan kegagalan pelaksanaan kegiatan sesuai dengan program, sasaran yang telah ditetapkan dalam rangka mewujudkan tujuan dan sasaran instansi pemerintah. Pengukuran kinerja dilaksanakan sesuai dengan Peraturan Menteri PANRB Nomor 53 Tahun 2014.

3.1.1 Skala Capaian Kinerja

Predikat nilai capaian kinerjanya dikelompokkan dalam skala pengukuran ordinal dengan pendekatan petunjuk pelaksanaan evaluasi akuntabilitas kinerja instansi pemerintah dan predikat capaian kinerja untuk realisasi capaian kinerja, sebagai berikut :

Tabel 3.1 Pengkategorian Capaian Kinerja

No	Kategori/Interpretasi	Rata-Rata % Capaian
1	Sangat Tinggi	91 ≤ 100
2	Tinggi	76 ≤ 90
3	Sedang	66 ≤ 75
4	Rendah	51 ≤ 65
5	Sangat Rendah	≤ 50

Sumber: Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017

3.1.2 Membandingkan antara target dan realisasi tahun pelaporan

Hasil pengukuran atas Perjanjian Kinerja Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Rembang tahun 2024 menunjukkan hasil sebagai berikut

Tabel 3.2 Capaian Kinerja Perjanjian Kinerja Tahun 2024

No.	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Target	Realisasi	Capaian %	Kategori	Sumber Data
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)
1.	Meningkatnya kapasitas ketangguhan bencana daerah	Indeks Ketahanan Daerah	0,61	0,65	106%	Sangat Tinggi	BNPB
1.1	Meningkatnya ketahanan daerah terhadap bencana	Presentase penanganan bencana daerah	84%	100%	119%	Sangat Tinggi	BPBD
1.2	Meningkatnya kualitas penanganan ketertiban umum dan ketenteraman masyarakat	Persentase pelayanan pemadaman dan penyelamatan kebakaran	85%	100%	117%	Sangat Tinggi	BPBD

Sumber : Hasil Perhitungan BNPB dan Rencana Strategis Badan Penanggulangan Bencana Daerah Tahun 2022-2026

Uraian penjelasan tabel :

1. Target Indeks Ketahanan Daerah Tahun 2024 adalah 0,61 dan realisasinya 0,65 capaian indikator sasaran kinerja sebesar 106% kategori penilaian Sangat Tinggi. Faktor pendukung/penghambat tercapainya kinerja yaitu perencanaan yang matang, efektivitas koordinasi antar lembaga, kecepatan respons terhadap bencana, serta keterlibatan masyarakat dalam mitigasi dan kesiapsiagaan, penyebaran informasi yang cepat dan akurat.

2. Target Persentase penanganan bencana daerah Tahun 2024 adalah 84% dan realisasinya 100% capaian indikator sasaran kinerja 119% kategori penilaian Sangat Tinggi. Faktor pendukung/penghambat tercapainya kinerja yaitu belum lengkapnya dokumen kebencanaan seperti dokumen RPB dan R3P, kurangnya anggaran untuk pembentukan desa tangguh bencana, minimnya sumber air bersih di desa pada saat musim kemarau.
3. Target Persentase pelayanan pemadaman dan penyelamatan kebakaran adalah 85% dan realisasinya 100% capaian indikator sasaran kinerja 117% kategori penilaian Sangat Tinggi . Faktor pendukung/penghambat tercapainya kinerja yaitu kurangnya kebutuhan sarpras damkar, dan belum terbentuknya UPT pos damkar untuk mencapai waktu tanggap 15 menit (respon time).

3.1.3 Membandingkan antara realisasi kinerja serta capaian kinerja tahun ini dengan tahun lalu dan 2 tahun terakhir

Perbandingan capaian kinerja tahun 2024 dengan capaian kinerja tahun sebelumnya atau tahun 2023 diuraikan pada tabel berikut :

Tabel 3.3 Perbandingan Capaian Kinerja

No	Tujuan/ Sasaran	Indikator Kinerja	Tahun 2021	Tahun 2022	Tahun 2023	Tahun 2024		
			Realisasi	Realisasi	Realisasi	Target	Realisasi	% Capaian
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)
1.	Meningkatnya kapasitas ketangguhan bencana daerah	Indeks Ketahanan Daerah	Na	0,55	0,63	0,61	0,65	106%
1.1	Meningkatnya ketahanan daerah terhadap bencana	Persentase penanganan bencana daerah	Na	73,44%	77%	84%	100%	119%
1.2	Meningkatnya kualitas penanganan ketertiban umum dan ketenteraman masyarakat	Persentase pelayanan pemadaman dan penyelamatan kebakaran	Na	80%	85%	85%	100%	117%

Sumber : Hasil Perhitungan BNPB dan Rencana Strategis Badan Penanggulangan Bencana Daerah Tahun 2022-2026

Uraian penjelasan tabel :

1. Nilai Indeks Ketahanan Daerah pada tahun 2022 realisasinya 0,55 pada tahun 2023 realisasinya 0,63, dan pada tahun 2024 realisasinya 0,65. Realisasi tiap tahun mengalami kenaikan dan capaian pada tahun 2024 adala 106%. Faktor pendukung/penghambat tercapainya kinerja yaitu perencanaan yang matang, efektivitas koordinasi antar lembaga, kecepatan respons terhadap bencana, serta keterlibatan masyarakat dalam mitigasi dan kesiapsiagaan, penyebaran informasi yang cepat dan akurat.
2. Presentase penanganan bencana daerah tahun 2022 realisasinya 73,44% pada tahun 2023 realisasinya 77%, dan pada tahun 2024 realisasinya 100%. Realisasi tiap tahun mengalami kenaikan dan capaian pada tahun 2024 adala 119%. Faktor pendukung/penghambat tercapainya kinerja yaitu belum lengkapnya dokumen kebencanaan seperti dokumen RPB dan R3P, kurangnya anggaran untuk pembentukan desa tangguh bencana, minimnya sumber air bersih di desa pada saat musim kemarau.
3. Persentase pelayanan pemadaman dan penyelamatan kebakaran tahun 2022 realisasinya 80% pada tahun 2023 realisasinya 85%, dan pada tahun 2024 realisasinya 100%. Realisasi tiap tahun mengalami kenaikan dan capaian pada tahun 2024 adala 117%. Faktor pendukung/penghambat tercapainya kinerja yaitu kurangnya kebutuhan sarpras damkar, dan belum terbentuknya UPT pos damkar untuk mencapai waktu tanggap 15 menit (respon time).

3.1.4 Membandingkan realisasi kinerja sampai dengan tahun ini dengan target jangka menengah yang terdapat dalam dokumen perencanaan strategis organisasi

Perbandingan realisasi kinerja sampai dengan tahun 2024 dengan target jangka menengah yang terdapat pada dokumen perencanaan strategis Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Rembang periode 2021-2026 diuraikan sebagai berikut :

Tabel 3.4 Kemajuan Capaian Sasaran Strategis

No.	Tujuan/ Sasaran	Indikator Kinerja	Realisasi Kinerja Tahun 2024	Target Akhir Rencana Strategis	Tingkat Kemajuan
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6) =4/5*100
1.	Meningkatnya kapasitas ketangguhan bencana daerah	Indeks Ketahanan Daerah	0,65	0,65	100%
1.1	Meningkatnya ketahanan daerah terhadap bencana	Presentase penanganan bencana daerah	100%	94%	106%
1.2	Meningkatnya kualitas penanganan ketertiban umum dan ketenteraman masyarakat	Persentase pelayanan pemadaman dan penyelamatan kebakaran	100%	90%	111%

Sumber : Hasil Perhitungan BNPB dan Rencana Strategis Badan Penanggulangan Bencana Daerah Tahun 2022-2026

Uraian penjelasan tabel :

1. Nilai Indeks Ketahanan Daerah target pada tahun 2026 adalah 0,65 dan realisasi pada tahun 2024 adalah 0,65 dengan tingkat kemajuan 100%. Faktor pendukung/penghambat tercapainya kinerja yaitu perencanaan yang matang, efektivitas koordinasi antar lembaga, kecepatan respons terhadap bencana, serta keterlibatan masyarakat dalam mitigasi dan kesiapsiagaan, penyebaran informasi yang cepat dan akurat.
2. Presentase penanganan bencana daerah target pada tahun 2026 adalah 94% dan realisasi pada tahun 2024 adalah 100% dengan tingkat kemajuan 106%. Faktor pendukung/penghambat tercapainya kinerja yaitu belum lengkapnya dokumen kebencanaan seperti dokumen RPB dan R3P, kurangnya anggaran untuk pembentukan desa tangguh bencana, minimnya sumber air bersih di desa pada saat musim kemarau.
3. Presentase pelayanan pemadaman dan penyelamatan kebakaran target pada tahun 2026 adalah 90% dan realisasi pada tahun 2024 adalah 100% dengan tingkat kemajuan 111%. Faktor pendukung/penghambat tercapainya kinerja yaitu kurangnya

kebutuhan sarpras damkar, dan belum terbentuknya UPT pos damkar untuk mencapai waktu tanggap 15 menit (respon time).

3.1.5 Membandingkan realisasi kinerja tahun ini dengan standar nasional/provinsi

Tujuan pembangunan daerah Provinsi Jawa Tengah adalah “Jawa Tengah yang Semakin Sejahtera dan Lestari” dengan 6 (enam) misi pembangunan daerah dan BPBD Provinsi Jawa Tengah masuk dalam isu strategis 3 (tiga) yaitu Ketahanan Sumber Daya Alam dan Lingkungan Hidup. BPBD Prov Jawa Tengah menetapkan tujuan perangkat daerah adalah “Meningkatkan Ketangguhan Masyarakat Jawa Tengah dalam Penanggulangan Bencana, dan Meningkatkan Kualitas Pelaksanaan Reformasi Birokrasi Perangkat Daerah” yang akan dicapai dengan lima sasaran perangkat daerah.

Perbandingan realisasi kinerja tahun 2024 Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Rembang dengan standar nasional/provinsi diuraikan sebagai berikut :

Tabel 3.5 Perbandingan Capaian dengan Standar Nasional/ Provinsi/Kabupaten/Kota

No	Tujuan/Sasaran	Indikator Kinerja	Realisasi Tahun 2024	Standar Nasional/ Provinsi/ Daerah sekitar	% Capaian
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6) =4/5*100
1.	Meningkatnya kapasitas ketangguhan bencana daerah	Indeks Ketahanan Daerah	0,65	0,74	88%
1.1	Meningkatnya ketahanan daerah terhadap bencana	Presentase penanganan bencana daerah	100%	100%	100%
1.2	Meningkatnya kualitas penanganan ketertiban umum dan ketenteraman masyarakat	Persentase pelayanan pemadaman dan penyelamatan kebakaran	100%	100%	100%

Sumber : Badan Nasional Penanggulangan Bencana

3.1.6 Analisis penyebab keberhasilan/kegagalan atau peningkatan/penurunan kinerja serta alternatif solusi yang telah dilakukan

Analisis penyebab keberhasilan/kegagalan atau peningkatan/penurunan kinerja serta alternatif solusi yang telah dilakukan disajikan pada tabel berikut :

Tabel 3.6 Analisis Keberhasilan, Kegagalan, dan Solusi

No	Tujuan/Sasaran	Indikator Kinerja	Target	Realisasi	% Capaian	Analisis Keberhasilan/ Kegagalan	Solusi yang dilakukan
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)
1.	Meningkatnya kapasitas ketangguhan bencana daerah	Indeks Ketahanan Daerah	0,61	0,65	106%	Perencanaan yang matang, Efektivitas Koordinasi Antar Lembaga, kecepatan respons terhadap bencana, serta keterlibatan masyarakat dalam mitigasi dan kesiapsiagaan, Penyebaran Informasi yang Cepat dan Akurat	Terus melakukan evaluasi menyeluruh terhadap implementasi IKD guna memastikan manfaat jangka panjang yang optimal
1.1	Meningkatnya ketahanan daerah terhadap bencana	Presentase penanganan bencana daerah	84%	100%	119%	Alokasi anggaran di tahun 2024 hanya cukup untuk sosialisasi dan pembentukan 2 desa tangguh bencana, target sampai tahun 2024 terbentuk 60 DESTANA dan realisasi sampai tahun 2024 terbentuk 30 DESTANA	Menganggarkan kembali di tahun berikutnya, sesuai target 1 tahun terbentuk 20 DESTANA, serta menghimbau kepada desa menganggarkan dana desa untuk membentuk DESTANA mandiri
1.2	Meningkatnya kualitas penanganan ketertiban	Persentase pelayanan pemadaman dan	85%	100%	117%	Perlunya penambahan anggaran untuk mencukupi	Menganggarkan kembali di tahun berikutnya

No	Tujuan/Sasaran	Indikator Kinerja	Target	Realisasi	% Capaian	Analisis Keberhasilan/ Kegagalan	Solusi yang dilakukan
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)
	umum dan ketenteraman masyarakat	penyelamatan kebakaran				kebutuhan sarpras damkar, dan terbentuknya UPT pos damkar untuk mencapai waktu tanggap 15 menit (respon time)	kekurangan kebutuhan sarpras damkar dan UPT pos damkar

Sumber : Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Rembang

Uraian penjelasan tabel :

1. Realisasi indeks ketahanan daerah melebihi target yang telah ditentukan yaitu 0,65. Untuk mempertahankan nilai IKD dengan terus melakukan evaluasi menyeluruh terhadap implementasi IKD guna memastikan manfaat jangka panjang yang optimal.
2. Realisasi presentase penanganan bencana daerah melebihi target yang telah ditentukan yaitu 100%, semua kejadian bencana ditangani dengan baik, meskipun di tahun 2024 hanya cukup untuk melakukan sosialisasi dan pembentukan 2 desa tangguh bencana di daerah rawan bencana.
3. Realisasi persentase pelayanan pemadaman dan penyelamatan kebakaran melebihi target yang telah ditentukan yaitu 100%, semua kejadian kebakaran ditangani dengan baik, namun penanganan belum mencapai waktu tanggap 15 menit (respon time). Untuk mencapai waktu tanggap 15 menit (respon time) perlu penambahan anggaran untuk mencukupi kebutuhan sarpras damkar, dan terbentuknya UPT pos damkar.

3.1.7 Analisis atas efisiensi penggunaan sumber daya

Adapun penyajian efisiensi atas penggunaan sumber daya disajikan pada tabel berikut:

Tabel 3.7 Perbandingan Pencapaian Kinerja dan Anggaran Tujuan dan Sasaran

No.	Tujuan/Sasaran	Indikator Kinerja			Anggaran			Tingkat Efisiensi
		Target	Realisasi	% Capaian	Anggaran	Realisasi	% Capaian	
					(Rp.)	(Rp.)		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)
1.	Meningkatnya kapasitas	0,61	0,65	106%	6.898.84 0.755	6.462.7 43.432	93,67%	11,64%

No.	Tujuan/ Sasaran	Indikator Kinerja			Anggaran			Tingkat Efisiensi
		Target	Realisasi	% Capaian	Anggaran	Realisasi	% Capaian	
					(Rp.)	(Rp.)		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)
	ketangguhan bencana daerah							
1.1	Meningkatnya ketahanan daerah terhadap bencana	84%	100%	119%	565.000.000	544.023.925	96,29%	19,09%
1.2	Meningkatnya kualitas penanganan ketertiban umum dan ketenteraman masyarakat	85%	100%	117%	450.000.000	428.896.014	95,31%	18,54%

Sumber : DPA Tahun 2024 Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Rembang

Uraian penjelasan tabel:

1. Meningkatkan kapasitas ketangguhan bencana daerah target pada tahun 2024 adalah 0,61 dan realisasi pada tahun 2024 adalah 0,65 dengan capaian 106%. Anggaran pada tahun 2024 sebesar Rp 6.898.840.755,- dan realisasi sebesar Rp 6.462.743.432,- dengan capaian 93,67%.
2. Meningkatkan ketahanan daerah terhadap bencana target pada tahun 2024 adalah 84% dan realisasi pada tahun 2024 adalah 100% dengan capaian 119%. Anggaran pada tahun 2024 sebesar Rp 6565.000.000,- dan realisasi sebesar Rp 544.023.925,- dengan capaian 96,29%.
3. Meningkatkan kualitas penanganan ketertiban umum dan ketenteraman masyarakat target pada tahun 2024 adalah 85% dan realisasi pada tahun 2024 adalah 100% dengan capaian 117%. Anggaran pada tahun 2024 sebesar Rp 450.000.000,- dan realisasi sebesar Rp 428.896.014,- dengan capaian 95,31%.

Tabel 3.8 Perbandingan Pencapaian Kinerja dan Anggaran Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan

Tujuan/ Sasaran	Indikator Kinerja	No.	Program/ Kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator Kinerja			Anggaran			Tingkat Efisiensi
				Target	Realisasi	% Capaian	Anggaran (Rp.)	Realisasi (Rp.)	% Capaian	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)
Meningkatnya kapasitas ketanggahan bencana daerah	Indeks Ketahanan Daerah	1.1	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	8573	9369,65	109%95%	5.883.840.755	5.489.823.493	93,7	6,3
		1.1.1	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	100%	100%	100%	4.898.931.455	4.532.088.965	92,5	7,5
		1.1.1.1	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	55 Org/bln	55 Org/bln	100%	4.818.651.455	4.451.808.965	92,4	7,6
		1.1.1.2	Pelaksanaan Penatausahaan dan Penguji/Verifikasi Keuangan SKPD	12 Dok	12 Dok	100%	80.280.000	80.280.000	100	0
		1.1.2	Administrasi Umum Perangkat Daerah	100%	100%	100%	131.374.000	126.925.622	96,6	3,4
		1.1.2.1	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	12 Pkt	12 Pkt	100%	5.000.000	3.691.800	73,8	26,2
		1.1.2.2	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	12 Pkt	12 Pkt	100%	18.000.000	16.508.000	91,7	8,3
		1.1.2.3	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	12 Pkt	12 Pkt	100%	15.518.000	14.304.500	92,2	7,8
		1.1.2.4	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	12 Pkt	12 Pkt	100%	12.888.000	12.630.000	98,0	2,0
		1.1.2.5	Penyediaan Bahan / material	12 Pkt	12 Pkt	100%	14.385.000	14.339.500	99,7	0,3
		1.1.2.6	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi Dan Konsultasi SKPD	12 Lap	12 Lap	100%	65.583.000	65.451.822	99,8	0,2
		1.1.3	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota	100%	100%	100%	735.891.000	716.780.506	97,4	2,6
		1.1.3.1	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	12 Lap	12 Lap	100%	400.000	380.000	95,0	5,0
		1.1.3.2	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	12 Lap	12 Lap	100%	108.600.000	102.904.756	94,8	5,2
		1.1.3.3	Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor	12 Lap	12 Lap	100%	104.600.000	101.376.800	96,9	3,1
		1.1.3.4	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	12 Lap	12 Lap	100%	522.291.000	512.118.950	98,1	1,9
		1.1.4	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang	100%	100%	100%	117.644.300	114.028.400	96,9	3,1

Tujuan/ Sasaran	Indikator Kinerja	No.	Program/ Kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator Kinerja			Anggaran			Tingkat Efisiensi
				Target	Realisasi	% Capaian	Anggaran	Realisasi	% Capaian	
							(Rp.)	(Rp.)		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)
			Urusan Pemerintahan Daerah							
		1.1. 4.1	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	8 Unit	8 Unit	100%	81.338.000	78.315.000	96,3	3,7
		1.1. 4.2	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	45 Unit	45 Unit	100%	20.090.000	19.687.500	98,0	2,0
		1.1. 4.3	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	3 Unit	3 Unit	100%	16.216.300	16.025.900	98,8	1,2
Meningkatnya ketahanan daerah terhadap bencana	Presentase penanganan bencana daerah	1.2	PROGRAM PENANGGULANGAN BENCANA	49,18% 100%	24,59% 100%	50% 100%	565.000.000	544.023.925	96,3	3,7
		1.2.1	Pelayanan Informasi Rawan Bencana Kabupaten/Kota	100%	100%	100%	196.150.000	194.263.000	99,0	1,0
		1.2. 1.1	Penyusunan Kajian Risiko Bencana Kabupaten/Kota	1 dok	1 dok	100%	196.150.000	194.263.000	99,0	1,0
		1.2.2	Pelayanan Pencegahan dan Kesiapsiagaan Terhadap Bencana	100%	100%	100%	245.000.000	230.092.400	93,9	6,1
		1.2. 2.1	Penguatan Kapasitas Kawasan untuk Pencegahan dan Kesiapsiagaan	2 Kawasan	2 Kawasan	100%	75.000.000	72.211.000	96,3	3,7
		1.2. 2.2	Pengembangan Kapasitas Tim Reaksi Cepat (TRC) Bencana Kabupaten/Kota	400 Org	400 Org	100%	100.000.000	90.819.900	90,8	9,2
		1.2. 2.3	Penyediaan Peralatan Perlindungan dan Kesiapsiagaan Terhadap Bencana kabupaten/kota	11 Unit	11 Unit	100%	70.000.000	67.061.500	95,8	4,2
		1.2.3	Pelayanan Penyelamatan dan Evakuasi Korban Bencana	100%	100%	100%	70.000.000	68.280.100	97,5	2,5
		1.2. 3.1	Penyediaan Logistik Penyelamatan dan Evakuasi Korban Bencana Kabupaten/Kota	50 Org	50 Org	100%	70.000.000	68.280.100	97,5	2,5
		1.2.4	Penataan Sistem Dasar Penanggulangan Bencana	49%	49%	100%	53.850.000	51.388.425	95,4	4,6
		1.2. 4.1	Penyusunan Kajian Kebutuhan Pascabencana (JITUPASNA) dan Rencana Rehabilitasi dan Rekonstruksi Pascabencana (R3P) Kab/Kota	3 Dok	3 Dok	100%	53.850.000	51.388.425	95,4	4,6

Tujuan/ Sasaran	Indikator Kinerja	No.	Program/ Kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator Kinerja			Anggaran			Tingkat Efisiensi
				Target	Realisasi	% Capaian	Anggaran	Realisasi	% Capaian	
							(Rp.)	(Rp.)		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)
Meningkatnya kualitas penanganan ketertiban umum dan ketenteraman masyarakat	Persentase pelayanan pemadaman dan penyelamatan kebakaran	1.3	PROGRAM PENCEGAHAN, PENANGGULANGAN, PENYELAMATAN KEBAKARAN DAN PENYELAMATAN NON KEBAKARAN	40 % 40 %	35,71 % 100%	89% 250%	450.000.000	428.896.014	95,3	4,7
		1.3.1	Pencegahan, Pengendalian, Pemadaman, Penyelamatan, dan Penanganan Bahan Berbahaya dan Beracun Kebakaran dalam Daerah Kabupaten/Kota	80%	80%	100%	400.000.000	382.847.014	95,7	4,3
		1.3.1.1	Pemadaman dan Pengendalian Kebakaran dalam Daerah Kabupaten/Kota	11 Lap	11 Lap	100%	246.412.000	236.337.500	95,9	4,1
		1.3.1.2	Penyelamatan dan Evakuasi Korban Kebakaran dan Non Kebakaran	1 Dok	1 Dok	100%	10.098.000	5.024.800	49,8	50,2
		1.3.1.3	Pengadaan Sarana dan Prasarana Pencegahan, Penanggulangan Kebakaran dan Alat Pelindung Diri	1 Unit	1 Unit	100%	143.490.000	141.484.714	98,6	1,4
		1.3.2	Pemberdayaan Masyarakat dalam Pencegahan Kebakaran	80%	80%	100%	50.000.000	46.049.000	92,1	7,9
		1.3.2.1	Pemberdayaan Masyarakat dalam Pencegahan dan Penanggulangan Kebakaran Melalui Sosialisasi dan Edukasi Masyarakat	210 org	210 org	100%	50.000.000	46.049.000	92,1	7,9

Sumber : DPA 2024 Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Rembang

Uraian penjelasan tabel:

$$\text{Rumus efisiensi} = 100\% - \frac{\text{Realisasi biaya} (\%)}{\text{Realisasi kinerja} (\%)} \times 100\%$$

Berdasarkan tabel diatas target kinerja dari setiap program, kegiatan, dan sub kegiatan tercapai 100%. Namun pada program penanggulangan bencana pada indikator kinerja presentase desa tangguh bencana belum mencapai target dikarenakan kurangnya anggaran untuk membentuk

desa tangguh bencana di kawasan rawan bencana. Program pencegahan, penanggulangan, penyelamatan kebakaran dan penyelamatan non kebakaran pada indikator presentase sarana dan prasarana damkar belum mencapai target dikarenakan kurangnya UPT pos damkar dan sarpras damkar. Rata-rata realisasi anggaran dari setiap program, kegiatan, dan sub kegiatan mencapai 95%.

3.2 Realisasi Anggaran

Dalam realisasi realisasi anggaran memuat penjelasan terkait anggaran yang digunakan serta tingkat efisiensi penggunaan sumber daya untuk mewujudkan kinerja organisasi sesuai dokumen Perjanjian Kinerja diuraikan sebagai berikut:

Tabel 3.9 Capaian Anggaran Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan

No.	Program/Kegiatan/ Sub Kegiatan	Anggaran (Rp)	Realisasi (Rp)	% Capaian
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
1.1	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	5.883.840.755	5.489.823.493	93,7
1.1.1	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	4.898.931.455	4.532.088.965	92,5
1.1.1.1	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	4.818.651.455	4.451.808.965	92,4
1.1.1.2	Pelaksanaan Penatausahaan dan Penguji/Verifikasi Keuangan SKPD	80.280.000	80.280.000	100
1.1.2	Administrasi Umum Perangkat Daerah	131.374.000	126.925.622	96,6
1.1.2.1	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/ Penerangan Bangunan Kantor	5.000.000	3.691.800	73,8
1.1.2.2	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	18.000.000	16.508.000	91,7
1.1.2.3	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	15.518.000	14.304.500	92,2
1.1.2.4	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	12.888.000	12.630.000	98,0
1.1.2.5	Penyediaan Bahan / material	14.385.000	14.339.500	99,7
1.1.2.6	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi Dan Konsultasi SKPD	65.583.000	65.451.822	99,8
1.1.3	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota	735.891.000	716.780.506	97,4
1.1.3.1	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	400.000	380.000	95,0

No.	Program/Kegiatan/ Sub Kegiatan	Anggaran (Rp)	Realisasi (Rp)	% Capaian
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
1.1.3.2	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	108.600.000	102.904.756	94,8
1.1.3.3	Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor	104.600.000	101.376.800	96,9
1.1.3.4	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	522.291.000	512.118.950	98,1
1.1.4	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	117.644.300	114.028.400	96,9
1.1.4.1	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	81.338.000	78.315.000	96,3
1.1.4.2	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	20.090.000	19.687.500	98,0
1.1.4.3	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	16.216.300	16.025.900	98,8
1.2	PROGRAM PENANGGULANGAN BENCANA	565.000.000	544.023.925	96,3
1.2.1	Pelayanan Informasi Rawan Bencana Kabupaten/Kota	196.150.000	194.263.000	99,0
1.2.1.1	Penyusunan Kajian Risiko Bencana Kabupaten/Kota	196.150.000	194.263.000	99,0
1.2.2	Pelayanan Pencegahan dan Kesiapsiagaan Terhadap Bencana	245.000.000	230.092.400	93,9
1.2.2.1	Penguatan Kapasitas Kawasan untuk Pencegahan dan Kesiapsiagaan	75.000.000	72.211.000	96,3
1.2.2.2	Pengembangan Kapasitas Tim Reaksi Cepat (TRC) Bencana Kabupaten/Kota	100.000.000	90.819.900	90,8
1.2.2.3	Penyediaan Peralatan Perlindungan dan Kesiapsiagaan Terhadap Bencana kabupaten/kota	70.000.000	67.061.500	95,8
1.2.3	Pelayanan Penyelamatan dan Evakuasi Korban Bencana	70.000.000	68.280.100	97,5
1.2.3.1	Penyediaan Logistik Penyelamatan dan Evakuasi Korban Bencana Kabupaten/Kota	70.000.000	68.280.100	97,5

No.	Program/Kegiatan/ Sub Kegiatan	Anggaran (Rp)	Realisasi (Rp)	% Capaian
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
1.2.4	Penataan Sistem Dasar Penanggulangan Bencana	53.850.000	51.388.425	95,4
1.2.4.1	Penyusunan Kajian Kebutuhan Pascabencana (JITUPASNA) dan Rencana Rehabilitasi dan Rekontruksi Pascabencana (R3P) Kab/Kota	53.850.000	51.388.425	95,4
1.3	PROGRAM PENCEGAHAN, PENANGGULANGAN, PENYELAMATAN KEBAKARAN DAN PENYELAMATAN NON KEBAKARAN	450.000.000	428.896.014	95,3
1.3.1	Pencegahan, Pengendalian, Pemadaman, Penyelamatan, dan Penanganan Bahan Berbahaya dan Beracun Kebakaran dalam Daerah Kabupaten/Kota	400.000.000	382.847.014	95,7
1.3.1.1	Pemadaman dan Pengendalian Kebakaran dalam Daerah Kabupaten/Kota	246.412.000	236.337.500	95,9
1.3.1.2	Penyelamatan dan Evakuasi Korban Kebakaran dan Non Kebakaran	10.098.000	5.024.800	49,8
1.3.1.3	Pengadaan Sarana dan Prasarana Pencegahan, Penanggulangan Kebakaran dan Alat Pelindung Diri	143.490.000	141.484.714	98,6
1.3.2	Pemberdayaan Masyarakat dalam Pencegahan Kebakaran	50.000.000	46.049.000	92,1
1.3.2.1	Pemberdayaan Masyarakat dalam Pencegahan dan Penanggulangan Kebakaran Melalui Sosialisasi dan Edukasi Masyarakat	50.000.000	46.049.000	92,1

Sumber : DPA Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Rembang Tahun 2024

Uraian penjelasan tabel:

Rata-rata realisasi anggaran setiap program, kegiatan, dan sub kegiatan mencapai 95%.

3.3 Lintas Sektor

Dalam hal penanganan bencana yang terjadi di daerah-daerah, Kepala Negara memerintahkan para kepala daerah untuk segera menyusun rencana kontingensi agar tata laksana pasca bencana dapat berjalan dengan baik. Presiden juga mengajak berbagai pihak yang tergabung dalam unsur pentahelix, yakni pemerintah, dunia usaha, akademisi atau pakar, masyarakat, dan media massa untuk berkolaborasi dalam melakukan pencegahan, pengelolaan lingkungan, rekonstruksi, hingga rehabilitasi dampak bencana di Indonesia. Kejadian bencana yang semakin meningkat.

Hal tersebut disampaikan Presiden dalam Rapat Koordinasi Nasional Penanggulangan Bencana 2020 yang berlangsung di Sentul International Convention Center, Sentul, 4 Februari 2020. Pada pembukaan Rakornas PB 2020 ini Presiden menyampaikan beberapa poin perintah kepada pemerintah pusat dan daerah dalam penanggulangan bencana. Hal tersebut disampaikan Presiden untuk menyikapi ancaman permanen. Beberapa poin berikut ini perintah Presiden:

Pertama, Seluruh instansi pemerintah pusat dan daerah harus bersama-sama, bersinergi untuk upaya pencegahan, mitigasi dan meningkatkan kesiapsiagaan. Pemerintah daerah perlu melakukan pengendalian tata ruang berbasis pengurangan risiko bencana. Sigap terhadap potensi ancaman bahaya sesuai dengan karakteristik wilayah, baik geologi, vulkanologi, limbah, hidrometeorologi, biologi, pencemaran lingkungan.

Kedua, Setiap gubernur, bupati dan walikota harus segera menyusun rencana kontinjensi termasuk penyediaan sarana dan prasarana kesiapsiagaan yang dapat betul-betul dilaksanakan semua pihak dan harus siap menangani bencana secara tuntas.

Ketiga, penanggulangan bencana harus dilaksanakan dengan pendekatan kolaboratif, 'Pentahelix' yaitu kolaborasi antara unsur pemerintah, akademisi dan peneliti, dunia usaha, masyarakat, serta dukungan media massa untuk dapat menyampaikan pemberitaan kepada publik.

Keempat, Pemerintah pusat dan pemerintah daerah harus meningkatkan kepemimpinan dan pengembangan sumberdaya manusia yang handal dalam penanggulangan bencana, penataan kelembagaan yang

mumpuni, termasuk program dan anggaran yang harus ditingkatkan sesuai prioritas RPJMN 2020-2024.

Kelima, Panglima TNI dan Kapolri untuk turut serta dalam mendukung upaya penanggulangan bencana termasuk penegakan hukum. Pengerahan dan dukungan secara nasional hingga ke tataran daerah yang dapat bersinergi dengan baik bersama pemerintah pusat dan daerah.

Selain itu, diperlukan juga peningkatan kapasitas aparatur Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) yang siap siaga bencana melalui pendidikan dan pelatihan baik dilakukan sendiri maupun oleh instansi kebencanaan lain yang kompeten. Secara eksternal, penguatan kelembagaan Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) harus menjadi prioritas untuk menunjang tiga fungsi yaitu : fungsi koordinasi, komando, dan pelaksana. Penguatan kelembagaan harus melibatkan seluruh OPD yang terlibat penanggulangan bencana seperti Sekretariat Daerah, BAPPEDA, BPPKAD, DPUTARU, PERKIM, DINAS KESEHATAN, DINSOSPPKB, DLH, SATPOL PP, DINKOMINFO, RSUD, PDAM, PLN, TNI/POLRI, seluruh Kantor Kecamatan, Kelurahan dan Desa dan Lembaga/Instansi lain terkait di Wilayah Kabupaten Rembang.

3.4 Prestasi Yang Dicapai

Prestasi yang telah diraih BPBD Kabupaten Rembang tahun 2024 berupa penghargaan sebagai penyelenggara latihan gabungan TRC kawasan muria raya (LATGAB TRC) dan sukses dalam penanganan bencana berupa ucapan terimakasih dari pihak terdampak bencana, prestasi peringkat pertama OPD dalam penilaian kesiapan.

BAB IV

PENUTUP

Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP) Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Rembang Tahun 2024 ini merupakan pertanggungjawaban tertulis atas penyelenggaraan pemerintah yang baik (*good governance*) Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Rembang Tahun 2024. Penyusunan LKjIP ini merupakan langkah yang baik dalam memenuhi harapan Peraturan Presiden Nomor 29 tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah, sebagai upaya untuk penyelenggaraan pemerintahan yang baik sebagaimana diharapkan oleh semua pihak.

LKjIP Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Rembang Tahun 2024 ini dapat menggambarkan kinerja Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Rembang dan Evaluasi terhadap kinerja yang telah dicapai baik berupa kinerja kegiatan, maupun kinerja sasaran, juga dilaporkan analisis kinerja yang mencerminkan keberhasilan dan kegagalan. Hasil laporan kinerja Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Rembang tahun 2024 dapat disimpulkan sebagai berikut:

1. Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Rembang memiliki dua sasaran strategis dengan dua sasaran strategis tercapai semua.
2. Faktor penghambat keberhasilan kinerja Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Rembang adalah:
 - a. Keterbatasan anggaran SPM menyebabkan belum optimalnya pencapaian pelayanan dasar kebencanaan, kebakaran, dan penyampaian informasi bencana kepada masyarakat di kawasan rawan bencana;
 - b. Masih terbatasnya sarana peralatan dan mobilitas penanggulangan bencana, dan pembaharuan sarana prasarana kebencanaan dan kebakaran;
 - c. Masih terbatasnya ketersediaan logistik, guna memenuhi kebutuhan dasar masyarakat terdampak bencana di Kabupaten Rembang;
 - d. Belum lengkapnya pedoman dan dokumen penyelenggaraan penanggulangan bencana di Kabupaten Rembang;

- e. Belum terfasilitasinya pembentukan desa tangguh bencana di seluruh desa rawan bencana Kabupaten Rembang;
- f. Belum memadainya peran serta masyarakat dan dunia usaha dalam penyelenggaraan penanggulangan bencana di Kabupaten Rembang;
- g. Kurangnya pengetahuan masyarakat dalam cara penanganan kebakaran yang benar;
- h. Kurang maksimal layanan pemadam kebakaran terhadap jarak lokasi kebakaran dikarenakan belum adanya UPT Pos Damkar dan armada hanya terpusat di Pos Damkar.

Rekomendasi langkah-langkah perbaikan kedepan yang perlu dilakukan oleh Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Rembang adalah sebagai berikut:

1. Melakukan sosialisasi pengurangan risiko bencana lebih difokuskan pada masyarakat yang menempati daerah rawan bencana dengan potensi/risiko tinggi;
2. Meningkatkan kerjasama antara pemangku kepentingan PB terutama pada peran masyarakat dan dunia usaha. Dunia usaha perlu didorong untuk meningkatkan peran dalam PB sejak pra bencana.
3. Melakukan koordinasi dan komunikasi secara efektif kepada Tim Anggaran Pemerintah Daerah (TAPD) Kabupaten Rembang dan DPRD Kabupaten Rembang untuk mengalokasikan anggaran yang tepat pada upaya penyelenggaraan penanggulangan bencana di Kabupaten Rembang.
4. Melakukan kerjasama dengan lembaga, dunia usaha terutama untuk mendukung penguatan kapasitas masyarakat. Program *Corporate Social Responsibility (CSR)* di berbagai lembaga usaha juga dapat dikelola sebagai bagian dukungan dunia usaha dalam upaya pengurangan risiko bencana.
5. Melakukan koordinasi dengan desa agar mengalokasikan anggaran desa untuk kebencanaan, mengingat bencana adalah tanggungjawab bersama.
6. Penambahan anggaran pada program kegiatan SPM kebencanaan untuk tercapainya pemenuhan pelayanan dasar kebencanaan.

Dengan tersusunnya Laporan Kinerja Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Rembang ini, diharapkan dapat memberikan gambaran Kinerja Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Rembang kepada pihak-pihak terkait baik sebagai *stakeholder* ataupun pihak lain yang telah mengambil bagian dengan berpartisipasi aktif untuk membangun.

Rembang, 24 Februari 2025

KEPALA PELAKSANA
BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH
KABUPATEN REMBANG



SRI JARWATI, M.Pd., M.H.
Pembina Utama Muda
NIP. 19660826 198806 2 0